

LAMPIRAN

Kompas.com

➤ **Berita 1****Anggota DPRD DKI Sebut Warga Banyak yang Keluhkan Fasilitas Transportasi Umum****11/09/2023, 22:50 WIB**

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membenahi fasilitas transportasi publik untuk digunakan masyarakat.

Suhud mengatakan, saat reses, dia mendapatkan keluhan mengenai fasilitas transportasi publik yang ujungnya berdampak pada kurangnya minat masyarakat.

"Transportasi publik dibenahi untuk kemudahan. Saya contohkan setiap saya reses itu Jak Lingko sedikit untuk bisa masuk ke masyarakat, terus juga kemudahan untuk mendapatkan kartu," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/9/2023).

"Apalagi isu mau dipotong subsidi transportasi, itu lebih parah lagi, ya harusnya kan diambil dari yang lain anggaran, jangan motong subsidi," katanya lagi.

Selain itu, Suhud menilai Pemrov DKI harus kembali mempertimbangkan soal imbauan kepada masyarakat dan kewajiban bagi ASN menggunakan kendaraan berbasis listrik.

"Harusnya berhenti, okelah mobil listrik katanya tidak memunculkan polusi, tapi kan banyak kajian menimbulkan yang lain, kemacetan, apakah mengurangi polusi," kata Suhud.

Menurut Suhud, Heru Budi semestinya mewajibkan para pejabat di Pemprov DKI menggunakan transportasi publik untuk menunjang aktivitas keseharian.

"Yang betul itu harusnya didorong masyarakat pakai transportasi publik kemudian transportasi publik dibuat nyaman dibikin murah, itu yang bener. Bukan tambal sulam kebijakannya," ucap Suhud.

➤ **Berita 2****70 persen Warga Jakarta Ditargetkan Beralih ke Transportasi Umum 12 September 2023 18:51 WIB**

Indonesia berkomitmen mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut ialah dengan menggalakkan penggunaan transportasi publik sebagai transportasi utama bagi warga Jakarta. Setidaknya, 60-70 persen warga Jakarta ditargetkan dapat beralih menggunakan transportasi publik.

Program tersebut juga merupakan upaya menekan polusi udara yang terjadi beberapa bulan terakhir di Jabodetabek. Apalagi, polusi terbesar disumbang oleh sektor transportasi dengan presentase mencapai 44 persen, diikuti industri manufaktur 31 persen, sektor perumahan dan komersial 15 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup berkelanjutan yang mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Moda transportasi umum dinilai merupakan salah satu sarana strategis untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan dan mendukung pengurangan polusi udara.

”Keterlibatan pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan capaian TPB/SDGs yang telah direncanakan,” kata Suharso dalam acara Kampanye Green Economy and Green Environment di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

”Sebagai bagian dari penduduk dunia, Suharso mengatakan, hal paling kecil yang dapat dilakukan adalah menyayangi bumi dengan turut bersama-sama menyelesaikan triple planetary crisis (perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati).

Akan tetapi, saat ini jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta masih lebih banyak dibandingkan dengan pengguna transportasi umum. Jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta saat ini sudah mencapai 15-20 juta kendaraan per hari.

Suharso menyampaikan, pemerintah juga sedang mengembangkan berbagai moda transportasi publik Jakarta. Di antaranya seperti pengembangan jalur MRT fase 2 dan light rapid transport (LRT).

Ketika berbagai infrastruktur transportasi publik sudah selesai dan mumpuni, Suharso berharap setidaknya 60-70 persen warga Jakarta beralih menggunakan transportasi publik.

Pembangunan transportasi publik pun tidak hanya berhenti di Jakarta. Sejumlah daerah lain diproyeksikan mempunyai beragam transportasi publik seperti di Jakarta.

Suharso menyebut, saat ini Jakarta merupakan kota dengan layanan transportasi terbaik di Indonesia. Terdapat berbagai moda transportasi di Jakarta, seperti mass rapid transit (MRT), LRT, bus Transjakarta, dan KRL.

Menurut Suharso, ada sepuluh kota di Indonesia yang berpotensi memiliki transportasi umum seperti MRT, dan LRT di masa mendatang. Dua di antaranya ialah Medan, Sumatera Utara; dan Surabaya, Jawa Timur.

Bappenas saat ini telah menyusun perencanaan pengembangan tersebut. Meskipun demikian, Suharso tidak menyebut secara spesifik kapan proyek moda transportasi tersebut bisa mulai diimplementasikan.

”Kami belum bisa menyebutkan lebih spesifik. Yang jelas siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Perencanaannya sudah disusun Bappenas,” ujarnya.

70.000 Penumpang

Sementara itu, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menargetkan dapat mengangkut 70.000 penumpang per hari pada akhir 2023. Jumlah tersebut melampaui target pada tahun 2022, yakni 50.000 penumpang per hari.

Pada Agustus 2023, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat menyebutkan, terdapat 3.025.826 orang yang menggunakan layanan MRT Jakarta. Jumlah

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata per hari, setidaknya sekitar 97.603 warga menggunakan layanan MRT Jakarta.

Adapun total jumlah perjalanan kereta yang digunakan ialah 8.253 perjalanan dengan ketepatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhenti mencapai 99,9 persen. Jumlah angka keterangkutan tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah total penumpang dari bulan sebelumnya, yakni 2.853.963 orang.

Untuk meningkatkan angka keterangkutan, PT MRT Jakarta akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (feeder) juga dinilai dapat mendorong peningkatan angka keterangkutan. Sebab, moda pengumpan juga mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat.

➤ **Berita 3**

Dorong Masyarakat Naik Kendaraan Umum, Transjakarta Siap Berikan Layanan Optimal

13/09/2023, 11:00 WIB

Polusi udara di Jakarta menjadi perhatian semua pihak, termasuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Transjakarta sebagai penyedia layanan transportasi publik di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi massal terbaik, agar semakin banyak masyarakat terdorong untuk menggunakan transportasi umum dalam bermobilitas, sehingga dapat mengurangi polusi udara.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza. Ia menyatakan, Transjakarta telah melayani satu juta pelanggan setiap hari, dengan 88 persen wilayah Jakarta tercakup dalam layanannya. Ini artinya, Transjakarta hadir sebagai layanan transportasi yang dapat diandalkan masyarakat untuk bepergian dan terbukti dari jumlah pelanggan harian yang dilayani.

"Sebagai perusahaan transportasi, pelayanan adalah prioritas kami. Bertumbuhnya pelanggan Transjakarta menandakan semakin tinggi kesadaran mereka untuk menggunakan transportasi umum, khususnya untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan," kata Welfizon.

Ia melanjutkan, Transjakarta menargetkan pengguna kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, untuk beralih menggunakan layanannya. Karena itu, Transjakarta akan terus meningkatkan mutu pelayanannya, dengan cara meningkatkan produktivitas layanan dan kenyamanan pelanggan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mencapai target empat juta pelanggan per hari pada 2025.

"Pemprov DKI Jakarta bersama kami dan penyedia layanan transportasi publik lainnya ingin masyarakat lebih memilih transportasi umum, salah satunya Transjakarta. Jika masyarakat sudah secara masif berpindah ke transportasi publik sebagai moda bepergian, kami percaya peningkatan kualitas udara yang signifikan akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta sendiri," ujar Welfizon.

Untuk mengatasi polusi udara yang penyebab terbesarnya sektor transportasi, Transjakarta pun akan menambah bus listrik. Saat ini, sudah terdapat 52 bus listrik yang beroperasi di tiga rute, yakni Pondok Labu-Blok M (1E) sebanyak 13 unit, Kampung Rambutan-Lebak Bulus (7A) sebanyak 14 unit, UI-

Lebak Bulus (D21) sebanyak 20 unit, serta lima unit untuk cadangan untuk beroperasi pada rute-rute tersebut.

“Pengoperasian bus listrik merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta bersama Transjakarta dalam memperbaiki kualitas udara dan menghadirkan pilihan transportasi umum ramah lingkungan. Hal ini akan mendukung pembentukan budaya masyarakat baru yang terbiasa bermobilisasi dengan kendaraan umum, terlebih lagi yang minim emisi,” tutur Welfizon.

Ia menambahkan, target dan upaya Pemprov DKI Jakarta melalui Transjakarta dengan menyediakan transportasi publik yang ramah lingkungan merupakan wujud keseriusan untuk dapat memberikan dampak panjang kepada generasi selanjutnya.

Welfizon meyakinkan bahwa Transjakarta akan berperan aktif dalam kolaborasi dan membuka peluang yang luas kepada pihak-pihak terkait, dalam menghadirkan gerakan nasional guna mewujudkan bukan hanya Jakarta, melainkan Indonesia yang berkelanjutan.

Komitmen Ekosistem Transjakarta terhadap menciptakan udara Jakarta yang lebih bersih termaterialisasi dalam program sustainability bertajuk #BersihBerdayaBestari yang diresmikan pada tanggal 18 Juli lalu di Halte CSW.

Kampanye #BersihBerdayaBestari merupakan komitmen Transjakarta dalam menyediakan layanan transportasi yang bersih dan bertanggungjawab terhadap lingkungan, memiliki dampak ekonomi kuat, serta memberikan layanan yang inklusif.

“Kami berharap agar upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Ekosistem Transjakarta akan menciptakan efek bola salju yang memicu gerakan-gerakan oleh pihak lainnya dalam menciptakan dunia yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung terciptanya kualitas udara Jakarta yang lebih baik,” jelasnya. Dalam rapat terbatas (ratas), Senin (14/8/2023), Presiden Joko Widodo juga mendorong agar lebih banyak warga yang menggunakan transportasi massal untuk bepergian, seperti Transjakarta, sebagai salah satu solusi mengurangi polusi udara di Jakarta.

Memaksimalkan layanan transportasi umum

Sejak hadir pada 2004, Transjakarta telah menjadi moda andalan warga untuk bepergian. Tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga buat masyarakat di daerah penyangga yang bekerja di Ibu Kota.

Hal ini diakui Dita, warga Jakarta Timur. Ia menggunakan bus Transjakarta karena tarif yang murah, jangkauan rute yang luas, dan faktor kenyamanan. Dita pun amat terbantu dengan kehadiran bus Transjakarta untuk bekerja ke kantornya di Jakarta Barat.

"Jarak dari rumah ke kantor itu sekitar 25 kilometer. Kalau mengendarai motor sendiri pasti capek. Jadi, saya memutuskan untuk naik bus Transjakarta. Lebih hemat dan tidak perlu macet-macetan," ungkap Dita.

Dari rumah, Dita naik ojek online (ojol) ke halte Transjakarta terdekat. Meskipun harus transit dua kali, ia enggan beralih ke kendaraan umum lain.

"Sejauh ini, saya nyaman menggunakan bus Transjakarta, karena sudah hafal kondisi jalan dan jadwal bus. Semoga, sistem transit lebih mudah dan

armadanya lebih banyak. Kalau bisa ditambahkan juga angkutan penghubung seperti Mikrotrans di daerah perumahan," ucapnya.

Penggunaan transportasi umum oleh masyarakat, termasuk bus Transjakarta, membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan menghadirkan sarana transportasi umum yang baik, polusi udara dari sumber bergerak dapat ditekan. Demikian pula kemacetan yang merupakan salah satu masalah klasik kota Jakarta.

Climate and Energy Campaigner Greenpeace Bondan Andriyanu juga berpendapat, optimalisasi transportasi umum, seperti bus Transjakarta, memang menjadi salah satu solusi mengatasi polusi udara. Hanya saja, ia menganggap perlu pematangan program berdasarkan data riil dari lapangan, agar sesuai dengan jenis dan penyebab polusi yang dialami Jakarta saat ini.

"Jika data yang dipakai menunjukkan bahwa penggunaan transportasi dapat mengurangi polusi, cara ini bisa saja berhasil. Namun, harus ditentukan juga berapa persen kendaraan pribadi yang harus dikurangi, untuk dapat membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Penggunaan metode push and pull perlu dipertimbangkan," urainya.

Bondan pun berharap, Pemprov DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, sebagai penyedia transportasi massal, Transjakarta juga harus meningkatkan mutu layanannya untuk menarik pelanggan lebih banyak.

"Misalnya, dengan memberlakukan sistem pembayaran yang mudah dan murah serta rute yang terintegrasi dengan lebih baik. Jangan sampai ketika masyarakat ingin beralih, pihak penyedia layanan tidak siap," paparnya.

Bondan pun berharap, upaya mendorong penggunaan transportasi umum dapat benar-benar menurunkan kadar polusi udara yang mulai mengancam kesehatan masyarakat. Sebab, pemerintah sudah harus menjadikan polusi udara sebagai masalah prioritas, sehingga harus dicarikan solusi yang berdampak.

"Jika solusi dari sisi transportasi berhasil, pemerintah harus menemukan cara agar dapat diaplikasikan dalam jangka panjang. Selain itu, karena polusi udara tidak 'ber-KTP', perlu ada riset untuk mencari sumber dan penyebarannya, agar bisa dikurangi atau dihentikan," bebernya.

Di sisi lain, Bondan mengharapkan pemerintah dapat bekerja sama dan berkoordinasi lintas sektoral untuk mencari solusi berkelanjutan, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Ia pun berharap, solusi yang dicetuskan dapat menjadi solusi nyata dan tidak hanya dari sisi transportasi saja.

Menurutnya, pemerintah dapat membuka kerja sama dengan pihak yang memiliki concern sama terhadap polusi udara, seperti ahli, komunitas, hingga masyarakat lintas sektoral. Hal ini akan membantu dalam menentukan regulasi dan penanggulangan masalah polusi udara yang lebih komprehensif serta tepat sasaran.

"Sebenarnya, masalah polusi sudah terdengar sejak 2019. Jadi, jika pemerintah berhasil menemukan solusi yang tepat, kita tidak bingung jika hal serupa terjadi lagi. Keterlibatan seluruh aspek masyarakat sangat penting untuk dapat mengatasi masalah ini," pungkas Bondan. (Rindu Pradipta Hestya)

➤ **Berita 4**

**Pemerintah Gagasan Organisasi Baru, Integrasikan Semua Moda Transportasi
27/09/2023, 13:24 WIB**

Pemerintah akan membentuk organisasi baru yang mengintegrasikan semua moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, organisasi itu dibentuk agar sistem angkutan itu tidak terpecah-pecah ke berbagai instansi.

"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek. Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat, nah jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Luhut mengaku ditunjuk Jokowi untuk menyiapkan pembentukan organisasi tersebut selama satu bulan ke depan.

Ia bakal mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait wacana mengintegrasikan moda-moda transportasi ke dalam satu organisasi itu.

"Presiden perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Saya akan undang nanti beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan," ujar Luhut.

Selain membentuk organisasi baru, pemerintah mewacanakan sistem tiket terusan atau bulanan sehingga masyarakat bisa menggunakan beragam jenis moda transportasi dengan satu tiket.

"Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan ongkos yang sangat memadai," kata Luhut.

➤ **Berita 5**

Jokowi Tunjuk Luhut Siapkan Organisasi yang Integrasikan Moda Transportasi Se-Jabodetabek

27/09/2023, 13:39 WIB

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyiapkan sebuah organisasi yang akan mengintegrasikan semua moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Luhut mengaku bakal mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait wacana mengintegrasikan moda-moda transportasi ke satu organisasi itu.

"Presiden perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Saya akan undang nanti beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan," kata Luhut usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Kendati demikian, ia menekankan bahwa organisasi itu tidak akan dipimpin oleh dirinya setelah terbentuk kelak.

Luhut pun menyampaikan, organisasi itu dibentuk agar sistem angkutan massal di Jabodetabek tidak terpecah-pecah ke berbagai instansi.

"Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat, nah jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut

Selain membentuk organisasi baru, pemerintah mewacanakan sistem tiket terusan atau bulanan sehingga masyarakat bisa menggunakan beragam jenis moda transportasi dengan satu tiket.

Luhut mengaku akan mengkaji sistem pembayaran tersebut dengan para pakar serta meminta pendapat dari publik.

"Saya kira dalam satu bulan presiden memberikan perintah, untuk kita menyiapkan bentuk organisasinya dan kira-kira bagaimana nanti subsidinya," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang sudah ada di wilayah Jabodetabek.

"Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Jokowi menuturkan, moda transportasi berbasis rel di atas mesti diintegrasikan dengan Transjakarta, bus, taksi online, dan ojek online.

Menurut dia, perlu ada sistem yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik sehingga mereka tertarik untuk menggunakannya.

"Karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar ada kerja sama antarpemedia transportasi publik sehingga masyarakat cukup satu kali memesan untuk bisa mengakses beragam jenis angkutan umum.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta, naik transjakarta sampai ke titik tujuan. Sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," kata Jokowi.

➤ **Berita 6**

Pemerintah Siapkan Skema Karcis Terusan untuk Akses Semua Jenis Moda Transportasi Publik

27/09/2023, 14:59 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan menyiapkan karcis terusan yang dapat mengakses semua jenis moda transportasi publik.

Hal ini disampaikan Luhut usai mengikuti rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang membahas integrasi moda transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

"Nanti bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan. Misalnya, dari Bogor kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur

dengan bus Transjakarta dan seterusnya, atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta langsung LRT, langsung nanti Transjakarta," kata Luhut, Rabu.

Luhut mengatakan, wacana tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Ia mengungkapkan, pemerintah juga akan memperbaiki kendaraan transportasi umum agar nyaman untuk digunakan dengan ongkos yang sesuai.

Luhut pun mengaku diberi waktu satu bulan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan skema tiket terusan yang diwacanakan tersebut.

"Ya nanti akan kita cari bentuknya, selama satu bulan ini kita akan list down semua permasalahannya," ujarnya.

Selain itu, Luhut juga diperintahkan oleh Jokowi untuk menyiapkan sebuah organisasi yang akan mengintegrasikan semua moda transportasi di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Luhut mengatakan, organisasi itu dibentuk agar sistem angkutan massal di Jabodetabek tidak terpecah-pecah ke berbagai instansi.

"Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada Pemda (pemerintah daerah), ada pusat. Nah, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut.

Saat menyampaikan pengantar dalam rapat, Jokowi mengusulkan adanya mekanisme tiket langganan untuk menggunakan transportasi publik yang disertai dengan diskon.

Ia juga ingin ada sistem pembayaran terintegrasi yang berlaku di semua moda transportasi se-Jabodetabek.

"Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal," kata Jokowi.

➤ **Berita 7**

Jokowi Ingin Moda Transportasi di Jabodebek Terintegrasi dan Diurus oleh Satu Organisasi

27/09/2023, 15:10 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan.

"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodebek. Jadi jangan terpecah-pecah, ada BUMN, pemda, pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," ujar Luhut, dilansir dari Antara, Rabu (27/9/2023).

Luhut menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proses integrasi moda transportasi publik tersebut dilakukan selama satu bulan ke depan untuk proses penyusunan struktur organisasi tunggal.

Selain itu, kata Luhut, kebijakan itu juga mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi.

"Bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan, untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya," katanya.

Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta, kata Luhut.

"Jadi intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan tentu ongkos yang sangat memadai," ucap Luhut.

Menurut Luhut, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.

"Misalnya bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus diesel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya sehingga cost-nya turun," katanya.

Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.

"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," kata Luhut.

➤ **Berita 8**

**Jokowi Minta Bentuk Organisasi Baru Urus Integrasi Transportasi Umum
28/09/2023, 09:02 WIB**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan membentuk organisasi baru untuk mengurus integrasi layanan transportasi di wilayah Jabodetabek.

"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek, jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (27/09/2023).

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan. Dalam pengintegrasian tersebut, kata Luhut, juga akan diatur mengenai pembelian tiket terusan atau tiket bulanan untuk pembayaran moda transportasi.

Darmaningtyas, pengamat transportasi dan ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi) mengatakan, sebaiknya optimalkan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) daripada membuat organisasi baru untuk mengoptimalkan layanan transportasi umum di Jabodetabek.

"Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015, BPTJ merupakan unit organisasi khusus yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek," kata pria yang akrab disapa Tyas tersebut kepada Kompas.com, Rabu (27/9/2023).

Oleh karena itu, menurut Tyas, guna menjawab permintaan Presiden Jokowi agar layanan transportasi di wilayah Jabodetabek diintegrasikan tidak diperlukan organisasi baru. Namun cukup mengoptimalkan peran BPTJ itu sendiri.

"Pemerintah tidak perlu membentuk organisasi baru lagi yang hanya memperbanyak lembaga dan memboroskan anggaran. Lebih baik optimalkan yang sudah ada," kata Tyas.

Tyas juga mengatakan, integrasi layanan transportasi di wilayah Jabodetabek sendiri bisa mencakup fisik, sistem, layanan, dan pengelolaan.

"Untuk layanan angkutan umum berbasis rel mungkin integrasi layanan ini mudah diwujudkan karena tidak banyak gangguan di perjalanan, tapi untuk layanan Transjakarta agak susah mengingat jalurnya tidak steril," kata Tyas.

➤ **Berita 9**

Pameran Transportasi "Hub Space" Dibuka hingga 1 Oktober 2023 30/09/2023, 21:00 WIB

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan Pameran Transportasi dan Travel Fair Bertajuk "Hub Space" di JCC Senayan, Jakarta pada 29 September 2023-1 Oktober 2023.

Pameran transportasi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2023.

Tujuannya adalah untuk mengenalkan berbagai transportasi massal yang ada di Indonesia kepada masyarakat, sebagai budaya baru bertransportasi.

Kegiatan pembukaan Hub Space pada 29 September 2023 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Menhub mengatakan, melalui kegiatan ini pemerintah ingin menyampaikan kiprah kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun transportasi selama hampir satu dekade.

"Dengan kolaborasi yang bagus antar-pemangku kepentingan di sektor transportasi, kita ingin membangun budaya baru melalui transportasi massal," ujar Budi Karya, dikutip dari laman resmi Kemenhub, Sabtu (30/9/2023).

Sejumlah kota di Indonesia memiliki beberapa masalah yaitu kemacetan dan polusi udara akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, pemerintah membangun angkutan massal perkotaan seperti BRT, KRL, LRT, MRT dan angkutan massal lainnya, dengan harapan masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.

"Membangun angkutan massal adalah keniscayaan, karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan," imbuh Budi Karya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok yang telah membangun konektivitas antar-wilayah melalui transportasi, Kemenhub memberikan penghargaan kepada para Menhub terdahulu yakni kepada Emil Salim, Agum

Gumelar, Hatta Rajasa, Jusman Syafii Djamal, Freddy Numberi, Evert Erenst Mangindaan, dan Ignasius Jonan.

Detik.com

➤ **Berita I**

Jatuh Hati Kepada LRT "Dari segi keuangan, ya, pastinya transportasi lain. Tapi, kalau misalkan lagi prioritas ke waktu, pastinya LRT."

02 September 2023

Dari balik jendela kaca di bangku LRT, Anastacia memandang ke arah Jalan Tol Lingkar Dalam Kota menuju Cawang, Jakarta Timur. Aneka kendaraan dari daerah sekitar penyangga ibu kota tengah berebut masuk. Di pagi dan sore hari, kepadatan di kawasan ini tak terelakkan karena volume lalu lintas yang tinggi.

Sudah genap seminggu LRT Jabodebek beroperasi, mencoba mengurangi kemacetan dari sisi Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta. Selama itu pula Anastacia menjajal moda transportasi Light Rail Transit. Sejak hari pertama dibuka secara komersil, perempuan berusia 22 tahun ini sudah tak sabar ingin segera menaiki LRT.

"Orang-orang juga udah pada excited untuk menggunakan LRT. Karena memang sangat efisien dengan waktu gitu, kan. Terus apalagi khususnya buat pekerja. Apalagi yang kerjanya di daerah Sudirman, misalnya," ucap Anastacia kepada detikX.

Dari rumahnya di Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Anastacia menumpang ojek online menuju Stasiun LRT Bekasi Barat. Waktu tempuhnya menggunakan sepeda motor hanya sekitar 7 menit saja. "Kadang dianterin, kadang naik ojek online," ucap pegawai swasta yang bekerja di daerah Cawang ini.

Di hari pertama pengoperasian LRT, Anastacia sengaja berangkat sedikit lebih pagi. Ia sudah menduga jika LRT di penampilan perdananya akan mengalami gangguan. Benar saja, rute LRT Jabodebek Harjamukti-Dukuh Atas yang ia tumpangi mengalami sejumlah kendala. LRT sempat beberapa kali berhenti karena mengalami mati listrik. Akibatnya, perjalanan Anastacia menuju kantor malah menjadi lebih molor.

"LRT mati-nyala terus. Saya nyampenya sekitar 2 jam, hampir sekitar 3 jam mungkin," katanya.

Meski sempat terhambat, Anastacia tak kapok menaiki LRT. Ia malah terlanjur jatuh hati dan ingin beralih menjadi penumpang setia LRT. Letak stasiun LRT ini sama-sama dekat dengan lokasi rumah dan kantornya. Selepas turun dari Stasiun Cawang, Anastacia tidak perlu berpindah transportasi umum lagi. Ia hanya perlu jalan kaki sejauh 500 meter saja. Belum lagi perbedaan waktu tempuh yang amat signifikan dan menyaingi transportasi publik pilihan Anastacia sebelumnya.

"Kan biasanya kalo naik KRL itu harus transit, harus nunggu lagi. Abis itu naik Transjakarta lagi. Bisa menghabiskan 1 sampai 1,5 jam. Tapi kan kalo misalnya naik LRT ini kaya cuma 20 menit itu udah sampai kantor," pungkas Anastacia. Saat menaiki KRL atau Commuter Line, dari Stasiun Bekasi,

Anastacia harus melakukan transit di Stasiun Manggarai menuju Stasiun Cawang yang tentunya teramat memakan waktu.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menetapkan tarif promo berupa diskon 78 persen untuk tarif layanan LRT Jabodebek. Untuk itu tarif flat sebesar Rp 5 ribu diterapkan di seluruh lintas pelayanan. Namun tarif promo ini hanya diberlakukan sampai akhir bulan September 2023 saja.

Meski nanti harga promo berakhir, Anastacia tetap memilih menaiki LRT. "Tergantung, nih prioritas orang tersebut seperti apa. Misalkan emang dari segi keuangan, ya, pastinya transportasi lain. Tapi kalau misalkan lagi prioritas ke waktu, pastinya LRT, sih," ucap Heri saat ditemui detikX di Stasiun LRT.

Sebagai karyawan Swasta yang tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta, Heri, sudah mencoba berbagai moda transportasi. Mulai dari KRL, Transjakarta, motor maupun mobil pribadi. Pilihan moda transportasi itu ia gunakan secara bergilir setiap hari. Begitu LRT diresmikan, tentu laki-laki berusia 42 tahun ini tak ingin ketinggalan.

"Ya, karena dekat sama rumah. Yang kedua nggak terlalu jauh. Terus menghindari kemacetan. Terus juga mengurangi polusi. Itu aja, sih," Dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Dukuh Atas ia tempuh dengan lama waktu 40 menit.

Ketimbang berbagai jenis kendaraan yang sudah pernah Heri coba, tidak ada yang bisa mengalahkan waktu tempuh LRT. "Belum lagi kalau naik motor, kan, resikonya capek lah ibaratnya, terus resiko kecelakaan dan sebagainya. Naik mobil juga macet, naik busway, ya, dempet-dempetan dan kalau transit itu kan agak lama, tuh. Kalau ini (LRT) kan nggak ada transit," terang Heri yang bekerja di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.

Meski lebih nyaman dengan LRT, Heri mengaku keberatan dengan tarif yang dikenakan LRT. Dengan modal uang Rp 10 ribu, Heri bisa pulang pergi menggunakan sepeda motor. Sementara dengan transportasi busway, Heri hanya perlu mengeluarkan kocek Rp 7 ribu dalam sehari.

"Walaupun masih bujang juga sayang kali sehari Rp 50 ribu buat LRT," tawa Heri. "Saya kalau Rp 5 ribu, saya tetap naik ini (LRT) terus," tutur Heri.

➤ Berita 2

Warga Ajak Keluarga Jajal LRT Jabodebek Tanpa Arah Tujuan di Akhir Pekan

03 Sep 2023 11:25 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek pada Senin lalu. Di akhir pekan ini, sejumlah warga memboyong keluarganya untuk sekadar menjajal moda transportasi baru ini tanpa arah tujuan jelas.

Seperti Juneadi (51) bersama putranya sengaja mengisi waktu Minggu paginya untuk mencoba LRT. Dia sengaja memilih akhir pekan agar terhindar dari desak-desakan antar penumpang.

"Oh iya hari ini pertama kali (menggunakan LRT). Soalnya kan kalau hari biasa ramai, kalau hari Minggu agak mendingan lah," katanya kepada detikcom saat ditemui di Stasiun Cawang, Minggu (3/9/2023).

Warga Jakarta Timur itu mengatakan, tak menentukan arah tujuan saat hendak menjajal kereta tanpa masinis itu. Dari Stasiun Dukuh Atas, dia akhirnya menaiki kereta tujuan Harjamukti, lalu kembali ke Stasiun Cawang.

"Tadi kan ada juga yang ke Jatimulya, kebetulan tadi yang standby di Dukuh Atas ke Harjamukti ya sudah kita naik," ungkapnya.

"Nggak ada tujuannya, cuma jalan-jalan aja. Sampai Harjamukti keliling stasiun, balik lagi, turun di cawang, mau pulang naik busway," sambungnya.

Juneadi mengatakan tak mengalami kesulitan dalam menjejat LRT hari ini. Dia berharap transportasi baru itu dapat menunjang aktivitas warga lebih lagi.

"Kereta nya masih baru, pelayanan nya juga bagus dari petugas nya baik di stasiun maupun dalam keretanya. Informasi nya juga lengkap dari tiap-tiap papan pengumumannya," ucapnya.

Serupa dengan Juneadi, warga lainnya Teguh Imam Agus (38) pun menjadwalkan mencoba LRT bersama keluarganya hari ini. Dia memboyong anak dan istrinya untuk berjalan-jalan menggunakan transportasi umum yang baru tujuh hari diresmikan.

"Pingin coba aja. Rencananya belum tahu kita ke mana aja, ikuti nanti lihat petunjuk aja ke mana aja arahnya," ujar Teguh.

Teguh mengaku sempat kesulitan melakukan top up kartu elektronik mandiri menggunakan mesin yang tersedia. Namun selebihnya, dia mengatakan belum menemui kesulitan saat hendak mencoba LRT.

"Kita coba top up mandiri dari mesin tapi nggak bisa, jadi kita manual ke petugas, itu aja kendalanya," ungkap Teguh.

Meskipun tidak menggunakan LRT setiap hari, Teguh menuturkan sangat antusias dengan adanya transportasi baru tersebut di ibu kota. Dia berharap adanya LRT dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Kalau saya sangat setuju jika ada transportasi seperti ini. Transportasi massal yang bisa membawa publik lebih banyak, insya Allah kendaraan pribadi mungkin akan lebih berkurang ketika ini akan beroperasi, jadi kemacetan akan lebih berkurang," harapnya.

Pantauan detikcom, Minggu (3/9/2024) di Stasiun Cawang, Jakarta Timur, suasana di stasiun terbilang lengang. Sejumlah penumpang dapat keluar masuk stasiun tanpa hambatan.

Sejumlah petugas tampak bersiaga di sekitar lokasi. Mereka juga terlihat sigap melayani calon penumpang yang mendapati kesulitan saat di stasiun.

Sebagai informasi, LRT Jabodebek baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin, (28/8) lalu di Stasiun Cawang. Masa uji coba, tarif LRT Jabodebek dipatok Rp5 ribu hingga akhir September untuk semua rute.

➤ **Berita 3**

Akhir Pekan, Masih Banyak Warga yang Ingin Mencoba LRT Jabodebek

03 Sep 2023 13:06 WIB

Lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek sudah sepekan beroperasi sejak diresmikan. Terlihat, antusiasme warga masih tinggi untuk mencoba di akhir pekan ini.

detikcom mencoba menjajal LRT dari Stasiun Cawang ke arah Dukuh Atas pada Minggu (3/9/2023) siang. Suasana di stasiun terbilang lengang. Sejumlah penumpang dapat keluar masuk stasiun tanpa hambatan.

Tak butuh waktu lama, kereta dari arah Harjakukti tiba. Terlihat gerbong sudah padat oleh penumpang.

Gerbong LRT Jabodebek terlihat diisi oleh warga yang sedang liburan. Mereka tampak datang bersama keluarga maupun kerabat. Para penumpang juga terdiri dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga penumpang lanjut usia.

Warga Jakarta Selatan, Ratih Swastika menuturkan memang telah menjadwalkan perjalanannya menjajal LRT hari ini. Dia mengaku penasaran dengan kereta tanpa masinis itu.

"Emang rencana (mencoba naik LRT) hari ini sama suami, sama anak. Soalnya penasaran katanya keretanya tanpa masinis, keren aja gitu," kata Ratih.

Ratih bersama keluarganya naik dari Stasiun Dukuh Atas. Kemudian mereka memilih kereta tujuan Harjamukti, lalu kembali lagi ke Dukuh Atas.

Perempuan 38 tahun itu, mengungkapkan pengalamannya menjajal transportasi baru itu. Menurutnya akan lebih mudah jika hendak berpergian ke Bekasi, Jawa Barat karena adanya LRT.

"Nyaman sih, enak seru, cepat. Ini kayaknya sampe bekasi rutenya lebih enak. Mudah banget, apalagi kalau punya rumah di Bekasi, udah nggak ribet nyari kendaraan umum," ungkap Ratih.

Senada dengan Ratih, Warga Bogor Lisa (34) pun sengaja mencoba naik LRT bersama keluarganya. Dari Bogor, mereka menggunakan kereta rel listrik (KRL) hingga Stasiun Cawang.

"Naik dari (stasiun) Cikoko karena saya naik KRL dulu," kata Lisa.

Lisa berujar tak mengalami kendala berarti saat menggunakan LRT. Hanya saja, menurutnya, tarikan pertama kereta tanpa awak itu terasa kurang smooth.

"Tadi cukup stabil sih, cuma pas tarikan pertamanya kurang smooth, syukurnya nggak ada gangguan berarti," imbuhnya.

Lisa mengaku pun bakal menjadi pengguna rutin LRT kedepannya. Hal itu sebab dirinya bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan dekat dari stasiun LRT.

"Buat nanti yang rutin kerja di kuningan kayaknya enakan naik LRT deh. (Bakal jadi pengguna rutin) kemungkinan iya sampai Cawang, karena kerjanya di sekitar kuningan," pungkas lisa.

Di sisi lain, suasana di Stasiun LRT Dukuh Atas tampak ramai. Antrean penumpang terjadi di area tap in dan tap out.

Kendati begitu sejumlah petugas tampak bersiaga di sekitar lokasi. Mereka terlihat sigap mengatur dan melayani penumpang yang mendapati kesulitan saat di stasiun.

Sebagai informasi, LRT Jabodebek baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin, (28/8) lalu di Stasiun Cawang. Masa uji coba, tarif LRT Jabodebek dipatok Rp5 ribu hingga akhir September untuk semua rute.

➤ **Berita 4****Beralih ke LRT untuk Kurangi Macet dan Polusi****06 Sep 2023 16:00 WIB**

Keberadaan LRT Jabodebek yang menggunakan sarana produksi dalam negeri (PT Inka) menunjukkan kemandirian dan kemampuan bangsa Indonesia untuk teknologi transportasi perkeretaapian. Sebelumnya, PT Inka juga membuat sarana LRT Sumatera Selatan dan Kereta Bandara, serta sarana yang digunakan PT KAI sekarang.

PT Inka ditempatkan sebagai industri strategis tidak harus ditargetkan memberikan keuntungan bagi negara. Namun diberi target menghasilkan karya yang unggul dan bermanfaat buat kemajuan teknologi transportasi Indonesia.

Desain dan hasil pekerjaan LRT Jabodebek telah mendapatkan persetujuan dan sertifikasi dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR. Selain itu, seluruh pekerjaan dari proyek ini juga telah dilakukan pengujian oleh Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) serta telah mendapatkan penilaian sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

Kementerian Perhubungan menetapkan tarif LRT pada 19 Juli 2023 dengan tarif termurah untuk satu kilometer pertama Rp 5.000 dan Rp 700 untuk setiap kilometer berikutnya. Tarif untuk jarak terjauh adalah Rp 27.500 dalam beberapa bulan setelah pengoperasian akan ditetapkan tarif khusus untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat menggunakannya.

Melihat struktur tarif, layanan LRT Jabodebek ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas. Tujuannya, supaya warga dapat meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih memakai angkutan umum, sehingga dapat mereduksi kemacetan lalu lintas di jalan.

Selain itu, setidaknya dapat membantu pula mereduksi polusi udara yang terjadi sekarang. Di sisi lain, kelompok masyarakat menengah ke bawah sudah disediakan KRL Jabodetabek dengan tarif yang lebih murah. Tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dari tarif KRL Jabodetabek dikarenakan prasarana dan sarana semuanya baru.

Namun harus diupayakan, ongkos warga yang menggunakan tidak lebih dari Rp 50 ribu untuk pulang pergi. Termasuk ongkos dari tempat tinggal menuju stasiun terdekat (first mile), menggunakan LRT Jabodebek dan stasiun tujuan menuju lokasi dikehendaki (last mile).

Hasil survei saya sebelum pandemi, rata-rata pengguna kendaraan pribadi dalam sehari menghabiskan ongkos transportasi per hari kisaran Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu. Kemudian, ada pembanding layanan Bus JR Connection yang cukup laris bertarif Rp 20 ribu sekali perjalanan berhenti di pusat Kota Jakarta, seperti Kawasan Blok M dan Monas.

LRT Jabodebek adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga seluruh stakeholder harus bekerja keras untuk menyukkseskannya. Pentingnya aksesibilitas ke stasiun menjadi titik pelayanan LRT Jabodebek. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses yang mudah dan nyaman menuju stasiun tersebut.

Untuk layanan angkutan umum yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek hanya layanan di wilayah DKI Jakarta yang sudah matang dan siap. Di wilayah

Bekasi dan Depok, masih kurang. Di Depok bahkan belum terlihat ada layanan transportasi publik memadai.

Supaya setiap pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati lintasan layanan LRT Jabodebek mau mendukung, Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian bisa memberikan warning kepada pemda untuk jauh-jauh hari mengalokasikan anggaran untuk rerouting layanan ataupun menyediakan bus.

Terkait keamanan dan keselamatan, informasi mengenai kedaruratan sudah disampaikan dalam bentuk video di stasiun dan kereta. Namun, masih diperlukan simulasi penanganan kedaruratan supaya semua petugas memahami prosedur dan tidak panik. Simulasi ini juga lumrah dilakukan di bandara, setidaknya diikuti para petugas supaya memahami apa yang harus dilakukan di saat genting.

Kemungkinan kemacetan di Stasiun TMII dapat terjadi, mengingat proses naik turun penumpang yang menggunakan angkutan umum masih memanfaatkan lahan tepi jalan tanpa tersedia celukan. Lain halnya, jika aktivitas itu dilakukan di dalam halaman stasiun, akan sangat membantu. Terlebih jika sudah terbangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan halaman parkir Taman Anggrek Indonesia Permai akan turut mengurangi menyeberang.

Di tengah tingginya tingkat polusi udara di Jakarta, pilihan menggunakan transportasi umum adalah sikap yang bijak. Kelompok warga menengah ke atas diharapkan mau meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan LRT Jabodebek.

Permasalahan kemacetan lalu lintas harus dituntaskan dengan komprehensif dan multi-sektoral. Penyelesaiannya harus lintas sektor. Jika tidak dilakukan mulai sekarang, dipastikan Jakarta dan sekitarnya akan terus didera kemacetan lalu lintas yang parah dan pada akhirnya memicu pelambatan ekonomi.

Djoko Setijowarno akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat

➤ **Berita 5**

Menhub Sebut Minimnya Angkutan Umum Bisa Bikin Ekonomi Boncos

10 Sep 2023 17:36 WIB

Integrasi antar-moda angkutan umum di ibukota masih sulit diakses dan membutuhkan terobosan lintas stakeholder untuk mewujudkannya. Bahkan menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minimnya angkutan umum bisa menimbulkan kerugian ekonomi.

Menurut Budi, selama ini operator angkutan umum masih menemukan kendala dalam meningkatkan jumlah penumpang harian yang disebabkan berbagai faktor. Contohnya seperti ketersediaan akses transportasi feeder untuk First Mile atau menuju stasiun maupun Last Mile atau menuju lokasi akhir, hingga kemauan untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dari sisi digitalisasi infrastruktur yang dimiliki.

Modernisasi angkutan umum juga terus dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

"Modal share (angkutan umum) di kota-kota Indonesia, masih kurang dibanding volume di Bangkok, Singapura, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Bapak Presiden berkali-kali mengatakan bahwa upaya meningkatkan angkutan massal akan menghilangkan kerugian ekonomi yang akan datang," ujar Budi dalam acara GoTransit Mobility Talk dikutip Minggu (10/9/2023).

Sementara itu Direktur ITDP Indonesia, Gonggontua E. Sitanggang mengatakan bahwa integrasi transportasi publik di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Transportasi publik itu bukan layanan door to door sehingga membutuhkan layanan First Mile-Last Mile.

"Kemudian tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan dari sisi sistem dan tarif yang diselaraskan untuk meningkatkan pengguna baru transportasi publik," ucapnya

Kesuksesan sinergi antara Gojek dengan operator transportasi publik lewat GoTransit telah berjalan sejak 2022 untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang nyaman di Commuterline. Sejak GoTransit diluncurkan, adopsi masyarakat terhadap tiket Commuterline digital telah meningkat hingga 3 kali lipat.

Menanggapi inovasi ini, Budi memberikan apresiasi dan berikan dukungan penuh bagi pelaku swasta seperti Gojek dalam membantu transportasi first mile dan last mile yang dirasa masih bermasalah karena lack of service yang ada. "Saya menyambut positif ide dari Gojek untuk melakukan ini, mengkolaborasikan banyak hal bahkan nanti yang lain lagi. Apalagi KAI sekarang sudah ada KRL, LRT dan punya kereta cepat," ucapnya.

➤ **Berita 6**

Kepala Bappenas Sebut Banyak Orang Pakai Kendaraan Pribadi di Jakarta

12 Sep 2023 13:07 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta lebih banyak dari pengguna transportasi umum. Untuk mengurangi jumlah polusi, ia meminta masyarakat mulai membudayakan penggunaan transportasi publik.

Suharso mengatakan jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta, motor maupun mobil, saat ini sudah mencapai sekitar 15-20 juta kendaraan per-hari.

Total 20 juta kendaraan tersebut lalu lalang lewat di jalan-jalan ibu kota. Dengan total 4 juta kendaraan berasal dari Jakarta, sementara 3 juta dari luar Jakarta. "Jadi kurang lebih sekitar 15-20 juta kendaraan bolak-balik (Jakarta) per-hari. Ini seingat saya. Jumlah konkretnya bisa dicek di kepolisian lalu lintas," ucap dia dalam agenda peluncuran kampanye Green Economy & Green Environment Selasa (12/9/2023).

Jika dibandingkan dengan salah satu moda transportasi publik, yakni MRT Jakarta, Suharso menilai sejumlah tersebut timpang jauh. Sebab, per Agustus 2023 ini, MRT tercatat 'baru' membawa 3 juta orang dalam satu bulan. Jika dirinci lagi, jumlahnya mencapai 97.603 orang per hari.

"Bayangkan dari 20 juta itu dibandingkan dengan jumlah per-hari. Jadi kecil sekali. Tapi ini MRT saja, ya," ungkapnya.

Dia menjelaskan pemerintah sedang mengupayakan pengembangan berbagai moda transportasi publik Jakarta. Di antaranya seperti pengembangan jalur MRT fase 2, serta light rapid transport (LRT).

Di masa yang akan datang, ketika berbagai infrastruktur transportasi publik sudah mumpuni, Suharso berharap setidaknya 60-70% dari total warga Jakarta kelak menggunakan transportasi publik. "Mudah-mudahan minimal 60-70% penduduk kota Jakarta menggunakan public transport. Itu harapan kita," jelas dia.

Tak Cuma di Jakarta

Suharso mengatakan pembangunan transportasi publik diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Sejumlah daerah lain diproyeksikan kelak juga mempunyai beragam transportasi publik. Suharso awalnya mengatakan Jakarta adalah salah satu kota terbaik di Indonesia dalam urusan transportasi publik.

Hal ini disebabkan berbagai moda transportasi ada di Jakarta seperti mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), bus rapid transit (BRT) TransJakarta, hingga KAI Commuter Line.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah berharap pengembangan transportasi publik tidak berhenti di Jakarta saja. Ia mengungkap ada sepuluh kota di Indonesia yang sebenarnya berpotensi memiliki MRT, LRT, maupun BRT di masa yang akan datang.

"Ada sepuluh kota, dua diantaranya Medan dan Surabaya. Itu berpotensi buat dikembangkan transportasi publiknya," ucap dia.

Menurutnya, Bappenas saat ini sudah menyusun perencanaan pengembangan tersebut. Kendati demikian, Suharso tidak menyebut secara spesifik kapan berbagai proyek moda transportasi itu bisa diimplementasikan.

"Buat waktu spesifiknya yang jelas siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Perencanaannya sudah disusun Bappenas," bebernya. Adapun bagi warga Kota Jakarta, Suharso pun menghimbau agar masyarakat mulai beralih ke transportasi publik untuk menjaga perubahan iklim dan mencegah polusi.

➤ **Berita 7**

Polemik Sistem Tiket Baru TransJ Cs Diduga demi Tarif Naik

23 Sep 2023 21:32 WIB

Penerapan account based ticketing (ABT) untuk tiga moda transportasi umum DKI Jakarta, yaitu LRT-MRT-TransJakarta mengundang polemik. Sebab, penerapan tiket berbasis akun itu disebut-sebut untuk menaikkan tarif transportasi Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan tujuan dari penerapan tiket berbasis akun supaya subsidi tiket yang digelontorkan di tiga mode transportasi publik milik DKI itu lebih tepat sasaran.

Sebab, saat ini tarif subsidi diterapkan untuk seluruh masyarakat yang menggunakan LRT, MRT dan TransJakarta, baik warga KTP DKI maupun non-KTP DKI. Nantinya, sistem ini akan memberikan gambaran pengguna LRT, MRT dan TransJakarta.

Sekadar informasi, saat ini tarif TransJakarta yang diberlakukan sebesar Rp 3.500 untuk satu kali perjalanan berlaku sama untuk jarak jauh maupun jarak dekat (flat). Sama halnya dengan TransJakarta, LRT DKI juga menerapkan tarif flat sebesar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Sementara tarif MRT Jakarta berkisar antara Rp 3.000-14.000 tergantung jarak tempuh.

"ABT tentu akan untuk 3 moda. Dari ABT ini kita akan mendapatkan profiling seluruh pengguna angkutan umum massal kita apakah TJ, MRT, dan LRT yang kemudian akan jadi perhitungan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO ke depannya," kata Syafrin Liputo kepada di sela rapat pembahasan APBD-P 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/9) lalu.

Sejauh ini, tahapan yang tengah dilakukan masih sebatas pengembangan teknologi dalam fitur tersebut. Ke depannya, teknologi tersebut bakal diupayakan untuk mengupayakan efisiensi PSO di 3 mode transportasi milik DKI itu.

"Dari sana kita bisa, pertama dengan data ini kita bisa mengestimasi kebutuhan first dan last mile si pelaku perjalanan yang nantinya disiapkan pemerintah. Selain tentu untuk efisiensi PSO," jelasnya.

Lebih lanjut Syafrin membeberkan cara kerja fitur ABT melalui aplikasi JakLingko. Penumpang 3 mode transportasi hanya perlu men-scan barcode yang tertera dalam aplikasi JakLingko ke mesin gate atau mesin tap on bus (TOB) maupun tap on microbus (TOM).

Nantinya sistem akan mendeteksi perjalanan penumpang. Jika penumpang berpindah-pindah lebih dari satu mode transportasi, akan diberlakukan tarif integrasi transportasi maksimal Rp 10 ribu.

"Jika dari titik A, apakah dia hanya satu moda kemudian apakah dia dua moda, tiga moda. Jika dia lebih dari 1 moda maka dia akan mendapatkan otomatis prinsip tarif integrasi yang maksimum Rp 10 ribu. Tapi jika satu moda, kita bisa mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan karena ini adalah profiling pengguna, dia masuk dalam tatanan Jakarta atau Bodetabek," terangnya.

PKB Ragu ABT Diterapkan: Tujuannya untuk Naikkan Tarif

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbially Ilyas mengaku ragu fitur Account Based Ticketing (ABT) bisa diterapkan untuk tiga moda transportasi Jakarta, yakni TransJakarta, LRT, dan MRT. Sebab, wacana itu sudah digulirkan sejak tahun lalu tapi tak kunjung direalisasikan.

"Ini wacana dari tahun lalu, saya tidak optimistis ini berjalan," kata Hasbi kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

Hasbi menyebut Pemprov DKI selalu membanggakan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta yang tembus 11 juta orang. Namun, kata dia, tak diketahui berapa sebenarnya jumlah pasti warga asli Jakarta yang memanfaatkan angkutan umum.

Di sisi lain, jumlah masyarakat yang berasal dari Bodetabek terus berdatangan ke Jakarta sehingga kemacetan pun tetap terjadi.

"Pak Syafrin (Kepala Dishub DKI) dengan bangga 11 juta penumpang kita. Ya, 11 juta itu lebih banyak warga Bekasi, Bogor, Depok. Bukan masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta paling banyak cuma 50 persen. Ini kan penyebabnya,

dari awal moda seperti itu kita bikin pun di Jakarta dan diterapkan tetap tak menghindari kemacetan," jelasnya.

"Sekarang invetarisasi saja nggak bisa. Berapa warga DKI yang naik itu? Dan berapa warga daerah naik itu? Gimana mau beda tarif, orang sekarang saja belum jelas," sambungnya.

Anggota Komisi B itu menegaskan posisinya bukan kontra terhadap rencana penerapan fitur ABT yang memungkinkan adanya kenaikan tarif transportasi umum berdasarkan profiling pengguna. Hasbi menganggap ini sebagai satu cara bagi Pemprov DKI meningkatkan pendapatan daerah.

Di sisi lain, Hasbi menekankan, jika kebijakan tersebut memberatkan warga, ia akan menolak keras.

"Kita akan terima kalau tidak memberatkan masyarakat. Karena ini tujuannya kan untuk menaikkan tarif. Ketidakmampuan Pemprov mendapat pendapatan tinggi. Ini kalau tidak membebani rakyat ya. Kalau bebani rakyat, saya tolak," tegasnya.

Hasbi juga mendorong adanya penambahan jumlah park and ride di wilayah Jakarta. Dengan begitu, banyak masyarakat melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum sehingga kemacetan pun dapat diatasi.

PDIP Ingatkan Transparansi Kebijakan

PDIP memandang perlu adanya transparansi kebijakan sebelum tiket berbasis akun diterapkan. Tujuannya supaya masyarakat tak menjadi korban atas kebijakan tak terukur.

"Transparansi kebijakan yang melibatkan masyarakat sangat perlu. Jangan masyarakat dikorbankan oleh kebijakan tak terukur," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (22/9/2023).

Politikus PDIP itu bakal mengevaluasi hasil uji coba fitur tiket berbasis akun yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak beberapa waktu lalu. Prinsipnya, dia meminta agar Pemprov DKI tak memaksakan kebijakan yang tak baik.

"Saya perlu hasil evaluasi ABT sebelumnya sebelum kemudian diputuskan. Kalau ternyata tidak baik, jangan dipaksakan," tegasnya.

Gilbert juga merespons rencana penerapan fitur ABT yang memungkinkan adanya kenaikan tarif transportasi umum berdasarkan profiling pengguna. Menurutnya, kenaikan tarif bertujuan agar public service obligation (PSO) yang digelontorkan tak semakin membengkakkan APBD DKI.

"Saya kira bukan alat mengakali, tapi tarif harus naik, karena sudah 17 tahun, sejak 2005 tarif itu. APBD DKI akan tergerus untuk PSO kalau tarif tidak naik. Naik berapa tentunya akan dihitung," jelasnya.

Kata Pakar soal Tiket Berbasis Akun di TransJ Cs

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai penerapan tiket berbasis akun dinilai tak relevan dengan upaya mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.

"Tentu rencana itu tidak relevan dengan upaya agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi angkutan umum maka

ide atau rencana itu sebaiknya tidak dilakukan," kata Edison Siahaan saat dihubungi, Sabtu (23/9/2023).

Edison juga meyakini wacana penerapan ABT berpotensi menimbulkan polemik di mata masyarakat. Pasalnya, tiket berbasis akun dinilai diskriminatif karena tarif akan ditentukan berdasarkan hasil pemetaan profil (profiling) penumpang.

"Bukan hanya potensi menimbulkan pro-kontra, penerapan tiket dengan sistem akun dan tarifnya berdasarkan profil sangat tidak berdasar dan beraroma diskriminatif," jelasnya.

Edison mengkritik langkah yang diambil pemerintah selalu mencari keuntungan dengan mengesampingkan layanan publik terjangkau bagi masyarakat.

"Rencana yang akan diterapkan itu adalah akibat dari cara atau prinsip pemerintah mengelola transportasi umum berdasarkan layanan profit sehingga otaknya selalu berfikir bagaimana mendapat untung sebanyak banyaknya. Padahal menyiapkan transportasi umum adalah layanan publik yang wajib diwujudkan pemerintah," tegasnya.

Edison juga mengingatkan bahwa penetapan tarif angkutan umum yang melayani antar kota mesti ditetapkan oleh menteri. Sementara gubernur untuk wilayah yang melampaui batas kabupaten. Hal tersebut merujuk pada Pasal 182 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Disebutkan penentuan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yg melayani trayek antar kota yang wilayahnya melampaui wilayah provinsi ditetapkan oleh menteri. Sedangkan Gubernur untuk wilayah yang melampaui batas kabupaten. Sementara Bupati untuk tarif angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten. Sedangkan tarif penumpang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum," jelasnya.

Sementara pakar transportasi Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung, menilai penerapan tiket berbasis akun bisa meringankan subsidi tiket yang selama ini digelontorkan oleh Pemprov DKI terhadap ketiga mode transportasi tersebut. Dengan adanya profiling, dapat diketahui penumpang mana yang berhak mendapatkan subsidi tiket.

"Walaupun tujuannya bukan hanya itu tapi salah satunya bisa seperti itu, bisa mengurangi. Karena bisa di-profiling, diketahui seperti apa pengguna perjalanan di Jakarta ini sehingga bisa cocok," kata Ellen.

"Kalau subsidi diberikan kepada orang yang punya rumah mewah nggak akan cocok. Jadi harus bisa saling mengisi dan bisa menandakan kalau sudah ada profiling-nya, mana mereka yang tinggal di Jakarta yang (berhak) disubsidi oleh Pemda DKI, dan mana yang luar Jakarta yang tak harus disubsidi Pemda DKI. Karena pajak mereka masuk ke DKI," sambung dia.

Ellen berujar sejauh ini, beberapa kota maupun negara di dunia telah lebih dulu menerapkan sistem serupa. Seperti misalnya di Singapura yang memberlakukan tarif berbeda terhadap turis luar dan warga lokal. Maupun di Inggris yang menggratiskan tarif bagi warga lanjut usia (lansia) di waktu tertentu.

Jika tiket transportasi umum di Jakarta berbasis akun, maka satu orang penumpang hanya bisa menggunakan satu akun. Menurutnya, fitur ini juga dapat mendukung penerapan tarif integrasi di mana penumpang bisa dengan mudah berpindah-pindah mode transportasi umum.

➤ **Berita 8**

Jokowi Minta Kaji Sistem Pembayaran Langganan untuk Transportasi Umum

27 Sep 2023 12:19 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pembayaran langganan untuk transportasi umum untuk dikaji. Jokowi mengatakan langkah itu guna menarik masyarakat agar berpindah ke transportasi publik.

"Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal," kata Jokowi dalam ratas terkait Integrasi Moda Transportasi Publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Jokowi juga meminta agar sistem pembayaran semua moda transportasi umum, dari ojek online, bus, kereta api, LRT, hingga MRT terintegrasi. Dia meminta ada satu alat pembayaran yang bisa digunakan untuk semua transportasi umum.

"Kemudian yang ketiga harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi," tuturnya.

Selanjutnya, Jokowi meminta agar dilakukan kerja sama dengan penyedia transportasi lain. Jokowi mencontohkan kolaborasi antara ojek, kereta, dan bus TransJakarta.

"Yang kedua, kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Akan sangat bagus bila masyarakat cukup satu kali pesan kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah dipersiapkan. Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik TransJakarta sampai ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," papar Jokowi.

➤ **Berita 9**

Luhut Dapat Tugas Baru dari Jokowi Urus Integrasi Transportasi

27 Sep 2023 13:04 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi terintegrasi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi.

Luhut mengatakan, Jokowi ingin urusan transportasi diurus oleh satu organisasi, tidak masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat. Jokowi memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya.

"Jadi jangan pecah-pecah, ada BUMN, ada pemda, ada pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi. Jadi sekarang presiden perintahkan selama satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya, dan kemudian nanti orang gimana bisa membeli karcis terusan, nanti karcis bulanan untuk satu angkutan," ujar Luhut usai rapat di Istana Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Jokowi menunjuk langsung luhut untuk mengurus struktur organisasi tersebut. Luhut berencana mengundang beberapa pakar untuk memberikan masukan.

"Presiden perintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien. Saya akan undang beberapa pakar-pakar untuk berikan masukan, sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah dari BUMN, dari mana-mana. Jadi struktur aja," jelasnya.

Saat dikonfirmasi apakah Luhut yang akan memimpin organisasi tersebut, ia menyebut ada orang lain yang melakukannya. Ia hanya ditugaskan menyusun dan menyiapkan organisasi.

"Nanti yang memimpin orang lain lah, saya hanya menyusun dan menyiapkan aja," terang Luhut.

Ia menambahkan, pemerintah juga sedang mencari bentuk karcis untuk sistem integrasi ini dalam sebulan ke depan. Ia memastikan pendapat publik akan dilibatkan, termasuk soal bentuk organisasinya.

Yang jelas, Luhut menyebut pemerintah ingin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebab kerugian yang ditimbulkan dari sektor transportasi ini bisa mencapai triliunan rupiah, salah satunya disebabkan oleh polusi.

"Ini kan kerugian negara dengan transportasi ini kan ratusan triliun juga, jadi karena polusi lah, karena apa lah. Jadi kita ingin mengurangi motor-motor pribadi dengan mobil listrik, dengan menyiapkan mobil angkutan publik yang bagus," pungkasnya.